

PERNAYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dan diajukan pada Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya asli merupakan karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya ilmiah.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi ini merupakan hasil perbuatan plagiarisme atau mencontek karya tulis orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaaan yang saya terima atau sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku

Serang, 05 Juni 2023

Asep Pudoli
NIM: 191120007

ABSTRAK

Nama : Asep Pudoli, NIM : 191120007 judul skripsi : Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XX/2022 terhadap Menteri dalam Sistem Pemerintahan Presidensial dan Perspektif Fiqh Siyasah

Berdasarkan putusan nomor 68/PUU-XX/2022, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa menteri dan pejabat setingkat menteri menjadi pejabat negara yang dikecualikan dari keharusan mengundurkan diri dari jabatannya ketika dicalonkan sebagai calon presiden atau calon wakil presiden. Putusan tersebut menjadi polemik di beberapa kalangan masyarakat, ada yang pro dan juga ada yang kontra. Masyarakat yang kontra terhadap putusan tersebut bukan tanpa alasan. Pasalnya putusan tersebut dikhawatirkan akan berimplikasi negatif terhadap tugas, kinerja, dan wewenang menteri dalam sistem pemerintahan presidensial. Kemudian bagaimana putusan tersebut dalam perspektif fiqh siyasah.

Rumusan masalahnya yaitu 1) Bagaimana implikasi putusan Mahkamah Konstitusi nomor 68/PUU-XX/2022 terhadap tugas dan kinerja menteri dalam sistem pemerintahan presidensial? 2) Bagaimana implikasi putusan Mahkamah Konstitusi nomor 68/PUU-XX/2022 terhadap wewenang menteri dalam sistem pemerintahan presidensial? 3) Bagaimana putusan Mahkamah Konstitusi nomor 68/PUU-XX/2022 dalam perspektif fiqh siyasah?.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implikasi putusan Mahkamah Konstitusi nomor 68/PUU-XX/2022 terhadap tugas, kinerja, dan wewenang menteri dalam sistem pemerintahan presidensial. Untuk mengetahui putusan Mahkamah Konstitusi nomor 68/PUU-XX/2022 dalam perspektif fiqh siyasah.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Pendekatan penelitian ini yaitu yuridis normatif. Untuk teknik pengumpulan data, peneliti menggunakan data primer, data sekunder, data tersier yang memiliki relevansi dengan penelitian penulis. Kemudian teknik pengolahan data menggunakan cara logika induktif yaitu dengan membahas dari yang bersifat khusus kemudian kepada yang bersifat umum.

Kesimpulan dari hasil penelitian ini yaitu 1) Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 68/PUU-XX/2022 memiliki implikasi negatif terhadap tugas dan kinerja menteri, yaitu berpotensi terganggunya tugas utama sebagai menteri dan berpotensi tidak optimalnya kinerja menteri. Hal tersebut dapat terjadi ketika menteri fokus terhadap kepentingan pribadinya dari pada menjalankan tugas utamanya sebagai menteri. 2) Implikasi terhadap wewenang menteri yaitu berpotensi terjadinya penyalahgunaan wewenang. Penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh seorang pejabat negara (menteri), salah satunya terjadi karena adanya konflik kepentingan. Hal tersebut dapat terjadi ketika menteri dalam menggunakan wewenangnya untuk kepentingan pribadi, kelompok, atau pendukungnya. 3) Sedangkan putusan tersebut dalam perspektif fiqh siyasah yaitu tidak ada larangan terkait menteri memiliki peran dan tugas ganda jika bisa berbuat adil dan mampu menjalankannya. Namun, lebih baik menteri tersebut mundur dari jabatannya untuk menghindari timbulnya kemudharatan.

Kata kunci : Implikasi, Tugas Menteri, Kinerja Menteri, Wewenang Menteri.

Nomor : Nota Dinas Kepada Yth.
Lampiran : 1 (satu) Eksamplar Dekan Fakultas Syariah
Hal : Pengajuan Munaqosyah UIN SMH Banten
Di Serang

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dipermaklumkan dengan sangat hormat, bahwa setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara **Asep Pudoli, NIM 191120007**, judul Skripsi : **Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XX/2022 terhadap Menteri dalam Sistem Pemerintahan Presidensial dan Perspektif Fiqh Siyasa**, diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasyah pada Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, maka kami ajukan skripsi ini dengan harapan agar bisa segera dimunaqasyahkan.

Demikian atas perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Serang, 05 Juni 2023

Pembimbing I

Pembimbing II



Prof. Dr. H. Zakaria Syafe'i, M. Pd.
NIP. 195602081992031001



Ade Jaya Suryani, M.A.
NIP. 198105062009121005

**IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR
68/PUU-XX/2022 TERHADAP MENTERI DALAM SISTEM
PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL DAN PERSPEKTIF FIQH
SIYASAH**

Oleh :

Asep Pudoli
NIM. 191120007

Menyetujui

Pembimbing I



Prof. Dr. H. Zakaria Syafe'i, M. Pd.
NIP. 195602081992031001

Pembimbing II



Ade Jaya Suryani, M.A.
NIP. 198105062009121005

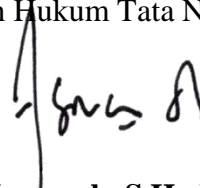
Mengetahui

Dekan
Fakultas Syari'ah



Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si
NIP. 196506071992031005

Ketua
Jurusan Hukum Tata Negara



Atu Karomah, S.H., M.Si
NIP. 196902141999032001

PENGESAHAN

Skripsi a.n. : **Asep Pudoli**, NIM : **191120007**, Judul Skripsi : **Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XX/2022 terhadap Menteri dalam Sistem Pemerintahan Presidensial dan Perspektif Fiqh Siyasah**, telah diajukan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada 31 Mei 2023. Skripsi ini diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang, 05 Juni 2023

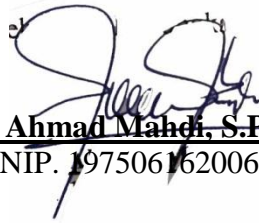
Sidang Munaqasyah

Ketua Merangkap Anggota,



Dr. H. Muhammad Ishom, M.A.
NIP. 197606232006041002

Sekretaris Merangkap Anggota,



Tb. Ahmad Mahdi, S.Pd.I., M.Pd.
NIP. 197506162006041008

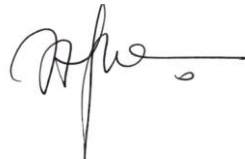
Anggota-anggota,

Penguji I



Dr. H. Ahmad Hidayat, Lc., M.A.
NIP. 1977081620005011004

Penguji II




Humaeroh, S.Ag., M.Pd.
NIDN. 2006077401

Pembimbing I



Prof. Dr. H. Zakaria Svafe'i, M. Pd.
NIP. 195602081992031001

Pembimbing II



Ade Jaya Suryani, M.A.
NIP. 198105062009121005

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahilabbil'amin...

Dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT., atas karunianya karena telah memberikan saya kemudahan serta kelancaran dalam menyusun dan menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orangtua tercinta, yaitu Bapak Astara dan Ibu Sariyah, yang mana selalu memberikan dukungan serta do'a terbaik demi kelancaran saya dalam menyusun dan menyelesaikan skripsi ini, mereka juga tidak pernah merasakan lelah sedikitpun dalam mendidik saya hingga saat ini.

Begitupun dengan adik-adik yang saya cintai dan sayangi Ahmad Rifa'i, Enong Faujiah dan Nafis Al-Bukhori yang selalu memberikan dukungan terbaik untuk saya dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga keluargaku selalu dalam lindungan Allah SWT., dan selalu mendapatkan kebahagiaan

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad), dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu sedang kamu mengetahui”. (QS. Al-Anfal [8]:27)

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Asep Pudoli, dari pasangan Bapak Astara dan Ibu Syariah, dilahirkan di Kabupaten Pandeglang, pada 03 November 2000. Sebagai anak pertama dari empat bersaudara. Penulis bertempat tinggal di Kampung Cisudang RT/RW 002 Desa Angsana Kecamatan Angsana Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten.

Jenjang pendidikan formal yang penulis tempuh adalah SDN Angsana 1 Kabupaten Pandeglang, selesai pada 2013, kemudian melanjutkan pendidikan di MTs Salafiyah Darul Bayan Cisudang Kabupaten Pandeglang, selesai pada 2016, kemudian melanjutkan pendidikan di MAN 3 Pandeglang pada jurusan IPS, selesai pada 2019, dan melanjutkan kuliah di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten dengan Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah pada 2019.

Selama menjadi mahasiswa di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, penulis aktif di berbagai organisasi intra kampus ataupun ekstra kampus. Adapun organisasi yang pernah penulis ikuti yaitu Himpunan Mahasiswa Bidikmisi (HMBM) Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten sebagai Ketua Umum 2021, Senat Mahasiswa (SEMA) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten sebagai Ketua Umum 2022, UKM Tapak Suci Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Komisariat Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, dan Jaringan Gusdurian Kabupaten Pandeglang.

KATA PENGANTAR

Bismillaahirrahmaanirrahim

Segala puji dan syukur kepada kehadiran Allah SWT, atas segala rahmat dan hidayah-Nya karena sudah memberikan kepada penulis sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang merupakan suri taulan bagi umat Islam hingga akhir zaman.

Alhamdulillah dengan segala pertolongan Allah SWT dan dengan usaha yang sungguh-sungguh, akhirnya penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan judul **Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XX/2022 terhadap Menteri dalam Sistem Pemerintahan Presidensial dan Perspektif Fiqh Siyasah**, merupakan tugas akhir yang diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mengalami kesulitan karena keterbatasan ilmu dan kurangnya keterampilan. Tetapi

berkat bantuan berbagai pihak, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan.

Oleh karena itu, penulis ucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Wawan Wahyudin, M.Pd., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah mengelola dan memimpin serta mengembangkan Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten menjadi lebih maju.
2. Bapak Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah membantu dalam memberikan pengarahan dalam menyusun dan menyelesaikan skripsi ini.
3. Ibu Atu Karomah, S.H., M.Si., selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara dan bapak Arif Rahman, M.H., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara, yang sudah memberikan jalan untuk menyetujui penulis dalam menyusun skripsi ini.
4. Bapak Prof. Dr. H. Zakaria Syafei'i, M.Pd. selaku Pembimbing I dan bapak Ade Jaya Suryani, M.A., selaku Pembimbing II yang senantiasa sabar dalam membimbing penulis dengan segenap tenaga serta pemikirannya demi menyelesaikan skripsi ini.

5. Seluruh dosen Fakultas Syariah, yang telah ikhlas dan sabar memberikan ilmunya kepada penulis.
6. Kedua orangtua tercinta Bapak Astara dan Ibu Sariyah, serta adik-adik tersayang Ahmad Rifa'i, Enong Faujiah, dan Nafis Al-Bukhori, yang telah memberikan dukungan serta do'a terbaik tanpa henti, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
7. Badan Pengurus Harian Himpunan Mahasiswa Bidikmisi 2021 yaitu Nurul Alfiah, Muhammad Ikhwan, Abdul Hamid dan kepada Badan Pengurus Harian Senat Mahasiswa Fakultas Syariah 2022 yaitu A. Fahru Rozi, Robiatul Adawiyah, dan Anistia Adiningsih, yang selalu solid dan saling mendukung dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Teman-teman Himpunan Mahasiswa Bidikmisi, khususnya Pengurus Kabinet Revolusioner Himpunan Mahasiswa Bidikmisi 2021, yang telah menjadi teman seperjuangan penulis selama kuliah di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
9. Serta semua pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Mengingat bahwa penulis masih ditahap belajar, maka untuk itu penulis sangat memohon maaf apabila dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, sehingga penulis sangat membutuhkan kritik serta saran yang bisa membangun skripsi ini dengan baik. Semoga dengan adanya skripsi ini bisa memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan para pihak pembaca umumnya.

Serang, 05 Juni 2023

Penulis

Asep Pudoli
NIM: 191120007

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	i
ASBTRAK.....	ii
SURAT PENGAJUAN UJIAN MUNAQSAH	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN	v
PERSEMBAHAN	vi
MOTTO.....	vii
RIWAYAT HIDUP.....	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Penelitian Terdahulu yang Relevan	10
F. Kerangka Pemikiran	18
G. Metode Penelitian	28
H. Sistematika Pembahasan.....	31
BAB II MAHKAMAH KONSTITUSI DAN PUTUSAN	
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 68/PUU-XX/2022	
A. Pengertian Mahkamah Konstitusi.....	34
B. Fungsi dan Wewenang Mahkamah Konstitusi	36
C. <i>Legal Standing</i>	39
D. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XX/2022	41
BAB III ALASAN PARA PEMOHON DAN PERTIMBANGAN	
HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM	
PUTUSAN NOMOR 68/PUU-XX/2022	
A. Alasan Para Pemohon terkait Pengujian Pasal 170 (1) UU 7/2017 terhadap UUD 1945.....	53

B. Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 68/PUU-XX/2022.....	64
C. Alasan Berbeda (<i>concurring opinion</i>).....	75

**BAB IV IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 68/PUU-XX/2022 TERHADAP MENTERI
DALAM SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL
DAN PERSPEKTIF FIQH SIYASAH**

A. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XX/2022 terhadap Tugas dan Kinerja Menteri dalam Sistem Pemerintahan Presidensial.....	82
B. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XX/2022 terhadap Wewenang Menteri dalam Sistem Pemerintahan Presidensial.....	96
C. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XX/2022 dalam Perspektif Fiqh Siyasah	106

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	114
B. Saran.....	116

DAPTAR PUSTAKA78